

# EFEKTIVITAS PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Wafaa' Nanda Septian Widarmanto  
NPP. 29.0999

Asdaf Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email: wafaananda20@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** The author focuses on the problem of the lack of public awareness in implementing the Disaster Resilient Village (Destana) program in Bojonegoro Regency. In fact, public awareness is a very basic and absolute thing in the implementation of this Destana program. In addition, the limited number of village facilitators and village locations that are far and difficult to reach make the evaluation and monitoring process of the Bojonegoro BPBD ineffective. As a community-based disaster risk reduction program, Destana seeks to motivate the community to participate in assessing, overcoming, monitoring, evaluating and reducing disaster risks that have the potential to occur in their environment, including by utilizing potential and local wisdom to ensure sustainability. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness of the Destana program in disaster mitigation in Bojonegoro Regency, the factors that hindered its implementation and efforts to overcome these obstacles. **Method:** This study uses a descriptive qualitative approach by analyzing the effectiveness based on the theory of Sondang P. Siagian (2015). Data collection techniques were carried out by in-depth interviews (12 informants), observation and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that there are limitations in the implementation of Destana in Bojonegoro Regency where the existing Human Resources are not ready, remote village accessibility, limitations in budgeting and the existence of local community culture who considers that a disaster is something that normal and unavoidable. For this reason, the Bojonegoro Regency BPBD strives to improve the effectiveness of the Destana program by conducting HR training in collaboration with the community as well as conducting periodic evaluations and monitoring. **Conclusion:** Researchers found that the implementation of Destana in Bojonegoro Regency as a whole has been going well but its effectiveness still needs to be improved. This is viewed in terms of the resources that need to be intensified again, the budget that needs to be added, the completeness of facilities and infrastructure that is not adequate and the quality and quantity of the Destana that has not been comprehensive in every village of Bojonegoro Regency..

**Keywords:** Effectiveness, Disaster Resilient Village, Disaster Mitigation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan program Desa Tangguh Bencana (Destana) di Kabupaten Bojonegoro.

Padahal notabenehnya kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar dan mutlak dalam penerapan program Destana ini. Selain itu, terbatasnya fasilitator destana serta lokasi desa yang jauh dan sulit dijangkau membuat proses evaluasi dan monitoring dari BPBD Bojonegoro menjadi tidak efektif. Sebagai program pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, Destana berupaya memotivasi masyarakat untuk ikut serta mengkaji, mengatasi, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko bencana yang berpotensi terjadi dilingkungan mereka, termasuk dengan memanfaatkan potensi dan *local wisdom* (kearifan lokal) untuk menjamin keberlanjutan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Destana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menganalisis efektivitas berdasarkan teori dari Sondang P. Siagian (2015). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (12 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu adanya keterbatasan dalam pelaksanaan Destana di Kabupaten Bojonegoro dimana Sumber Daya Manusia yang ada belum siap, aksesibilitas desa yang jauh, keterbatasan dalam penganggaran serta adanya budaya masyarakat lokal yang menganggap bahwa suatu bencana merupakan hal yang normal dan tidak dapat dihindari. Untuk itu BPBD Kabupaten Bojonegoro mengupayakan dalam meningkatkan efektivitas program Destana dengan melakukan pelatihan SDM bekerja sama dengan masyarakat serta melakukan evaluasi dan monitoring berkala. **Kesimpulan:** Peneliti mendapati bahwa pelaksanaan Destana di Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Hal tersebut ditinjau dari segi sumber daya yang perlu diintensifkan lagi, anggaran yang perlu ditambah, kelengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai serta kualitas dan kuantitas Destana yang belum menyeluruh di setiap Desa Kabupaten Bojonegoro. **Kata kunci:** Efektivitas, Desa Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kecenderungan indeks risiko bencana dengan kategori tinggi. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, Kabupaten Bojonegoro termasuk kedalam kategori rawan tinggi dengan skor 150 dan menempati ranking 119 nasional, sedangkan pada tahun 2016 skor risiko bencana menurun menjadi 104,65 atau kategori sedang (BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2020). Kabupaten Bojonegoro telah mengalami berbagai kejadian bencana alam dalam rentang tahun 2018-2021. Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, banjir, dan kekeringan. Selain itu terdapat 7 macam bencana alam yang berpotensi tinggi terjadi di Bojonegoro yakni : 1. Banjir (luapan sungai bengawan solo); 2. Banjir bandang; 3. Kekeringan; 4. Angin kencang; 5. Kebakaran Hutan; 6. Gempa Bumi; dan 7. Tanah longsor (BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2020). Meski telah mengalami penurunan dalam kurun waktu 3 tahun, tingkat risiko bencana yang tinggi tetap patut diwaspadai karena menunjukkan bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian bencana juga tinggi. Dengan wilayah yang tingkat risiko bencananya tinggi, Kabupaten Bojonegoro memiliki jenis bahaya lebih dari satu jenis (multi hazard).

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan sebelum, pada saat, ataupun sesudah terjadinya bencana. Proses dan akibat dari adanya bencana jelas telah mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat luas. Oleh karena itu pencegahan, penanganan, serta penanggulangan bencana memerlukan kehadiran Negara. Pemerintah harus berperan langsung dalam upaya pengurangan risiko bencana, karena hal ini bukan lagi urusan individu namun juga menyangkut keselamatan masyarakat luas. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana Pemerintah



dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Salah satu penanggulangan bencana yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan diadakannya Desa Tangguh Bencana (Destana). Desa Tangguh Bencana ialah desa yang mempunyai keterampilan sendiri dalam menganalisis ancaman bencana dan memperbaiki diri dengan cepat dari akibat menghadapi ancaman bencana sesuai dengan Perka BNPB No 1 Tahun 2012. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menjadi salah satu upaya yang melibatkan masyarakat aktif ketika mempelajari, menganalisis, mengatasi, mengatur, mengevaluasi, serta menurunkan risiko bencana di wilayah mereka, dengan menggunakan berbagai kearifan lokal yang ada. Mitigasi pada dasarnya ialah upaya-upaya dalam persiapan fisik dan non fisik untuk siap dalam membantu penanggulangan bencana alam. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Nugroho (2020) yang mengatakan tujuan utama dari mitigasi bencana adalah mengurangi risiko cedera dan kematian masyarakat atau timbulnya korban jiwa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 Tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan mitigasi bisa dilaksanakan dengan a) perwujudan pembenahan ruang, b) mengontrol pembangunan, seperti infrastruktur, tata bangunan; dan c) pelaksanaan edukasi, pengarahan dan penataran secara konvensional maupun modern. Selanjutnya Rahmat (2006) juga menjelaskan bahwa mitigasi bencana yang efektif terdiri dari tiga unsur penting meliputi penilaian bahaya (*hazard assessment*), peringatan (*warning*), dan persiapan (*preparedness*).

## **1.2. Kesenjangan Masalah**

Pada umumnya kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar dan mutlak dalam penerapan program destana ini untuk dapat mengurangi dampak buruk dan kerugian dari terjadinya bencana alam. Namun seperti yang diketahui kesadaran masyarakat akan muncul ketika dipicu oleh sesuatu yang membuat mereka mengerti dan memahami akan dampak yang ditimbulkan. Terkendalanya sumber daya masyarakat yang terbatas menyebabkan jumlah relawan yang minim dalam partisipasinya kedalam program serta belum siapnya mereka dalam menghadapi bencana. Selain permasalahan diatas, dalam menunjang pelatihan masyarakat tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Terbatasnya fasilitator destana serta lokasi desa yang jauh dan sulit dijangkau membuat proses evaluasi dan monitoring dari BPBD menjadi tidak efektif. Sementara itu adanya problem keadilan gender dimana muncul anggapan bahwa yang berhak menerima pelatihan adalah kaum pria saja. Padahal semuanya memiliki kondisi dan status yang sama untuk menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya terhadap program ini. Aspek lain yang menjadi permasalahan adalah adanya anggapan yang membudaya dalam masyarakat yang menganggap bahwa suatu bencana alam merupakan hal yang normal dan tidak dapat dihentikan maupun dihindari. Sehingga menyebabkan masyarakat seakan acuh tak acuh terhadap upaya penanggulangan sebelum terjadinya bencana alam. Terlepas dari hal tersebut BPBD Kabupaten Bojonegoro terus meningkatkan dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat di setiap wilayah Kabupaten Bojonegoro utamanya yang merupakan daerah rawan bencana.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang sama yaitu mengenai Desa Tangguh Bencana meskipun tema penelitian serta lokasinya berbeda. Sehingga akan terbukti penelitian yang dilakukan bukan duplikasi maupun plagiasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian oleh Miftakhul Munir menemukan bahwa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Desa Tangguh Bencana belum maksimal yaitu masih kurangnya minat dan kesadaran generasi muda, kurangnya fasilitas yang dimiliki relawan destana, serta belum adanya anggaran guna pengadaan operasional (Munir, 2016). Penelitian Inda Sintya Prastika mengemukakan

bahwa dengan tidak adanya perbedaan kinerja pada aspek legislasi yang mana mencapai 100% menunjang keberhasilan penanggulangan bencana alam dari Destana yang maksimal selain itu dalam pencapaian pada aspek perencanaan, pendanaan, kelembagaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Destana juga ditentukan kinerja pelaksanaan di lapangan (Prastika, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Orizal Fikri menemukan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Destana yaitu berupa kurangnya dukungan dari pemerintah yang terkait produk hukum, anggaran, dan sumberdaya yang berkompeten yang menjadikan pelaksanaan Destana di lapangan belum maksimal (Fikri, 2016).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menilai efektivitas desa tangguh bencana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang masih baru dan belum dilakukan oleh orang lain. Penelitian oleh peneliti ini memiliki topik yang berbeda dari topik penelitian yang pernah ada yang membahas tentang deskripsi efektivitas, faktor penghambat dan upaya memaksimalkan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas program Destana dalam mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro, faktor-faktor penghambat pelaksanaannya serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sumaryanto (2001) yaitu dimulai dari tahapan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk verifikasi kembali agar mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga akan memperoleh data akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Sekretaris BPBD, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan masing-masing 1 (satu) orang serta FPRB Desa, Kepala Desa dan masyarakat yang masing-masing sejumlah 3 (tiga) orang. Adapun analisis yang peneliti gunakan berdasarkan teori efektivitas dari Sondang P. Siagian tahun 2015 yang menggunakan dimensi sumber daya, dana, sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas serta waktu.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis efektivitas program Destana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro menurut teori Sondang P. Siagian. Dalam teori tersebut mengungkapkan Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu program yaitu sumber daya, dana, sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas, serta waktu. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Sumber Daya**

Penulis melakukan analisis efektivitas dari pelaksanaan Destana yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Bina manusia yang dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kapasitas pengrajin cor kuning dalam produksi serta pengembangan kapasitas pengrajin cor kuning dalam manajemen usaha.

#### **Tabel 1.**

Pelaksanaan Program Destana dari segi Sumber Daya



Sumber Daya	Kondisi kualifikasi	Keterangan
<b>BPBD Bojonegoro</b>	pegawai diisi oleh kualifikasi pendidikan SLTA sejumlah 7 orang dan S1 sejumlah 5 orang. Sedangkan untuk S2 tidak ada	Secara umum jika dilihat dari segi kualitas dan kuantitas, pegawai yang memiliki kompetensi masih belum mencukupi. Sejumlah bidang yang kekurangan staf dengan status PNS dibantu dengan Pegawai tidak tetap
<b>Kerjasama antar Instansi</b>	Sinergi bersama TNI-Polri di Kabupaten Bojonegoro	Hubungan yang baik tersebut tercipta melalui kerjasama dan koordinasi yang konstruktif dan berkesinambungan di antara instansi terkait
<b>Masyarakat Kabupaten Bojonegoro</b>	pada dasarnya sudah memahami bagaimana keadaan jika terjadi bencana alam, terutama banjir	Memperoleh pelatihan dan sosialisasi Destana

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2022

Terkait pelaksanaan program Destana dari segi sumber daya sebagaimana tabel 1. nantinya Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi lain seperti BPBD, TNI, POLRI, dan sebagainya agar para masyarakatnya yang antusias untuk menjadi relawan Destana dapat memiliki kemampuan yang berguna disaat bencana terjadi. Hal tersebut tentunya menjadi perhatian sangat penting, dimana mereka selalu siap siaga kapanpun bahkan jika tanda-tanda bencana sudah muncul. Mereka berperan aktif sebagai penggerak program Destana agar dapat berjalan dengan lancar dan nantinya berguna bagi masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dalam mengantisipasi bencana alam.

### 3.2. Dana

Penulis melakukan analisis terhadap pendanaan program Destana. Dalam menjalankan sebuah program tentunya membutuhkan dukungan finansial ataupun dana untuk menyokong program tersebut agar berjalan sesuai yang diharapkan.

**Tabel 2.**

Pelaksanaan pendanaan program Destana di Kabupaten Bojonegoro

Pendanaan	Bentuk	Keterangan
<b>Sumber Pembiayaan</b>	berasal dari 2 sumber, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang dimuat di dalam DPPASKPD (Daftar Pelaksanaan Perubahan	Tahun 2020 terbentuk 5 Destana. Tahun 2021 terbentuk 25 Destana
<b>Pengelolaan Anggaran</b>	Penganggaran kebencanaan mulai dari pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.	Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara pembentukan destana dari pusat yaitu BNPB, 20 destana untuk kawasan bengawan solo

Sumber: diolah oleh Peneliti,2022

Terkait dengan pendanaan yang ada seperti dalam tabel 2. peneliti menemukan terbatasnya anggaran membuat proses pengembangan dan pemeliharaan Desa Tangguh Bencana menjadi terhambat. Bahkan penambahan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Bojonegoro masih belum bisa dilakukan secara massal karena terbentur masalah anggaran. Hal ini membuat masih banyak desa rawan bencana yang belum mendapatkan pembentukan peningkatan kapasitas masyarakat untukantisipasi bencana alam.

### 3.3. Sarana dan Prasarana

Peneliti melakukan analisis terkait sarana dan prasarana yang tersedia selama pelaksanaan Destana di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan karena unsur sarana prasarana menjadi salah satu penunjang keberhasilan terlaksananya program Destana di lapangan.

**Tabel 3.**

Sarana dan Prasarana pelaksanaan Destana di Kabupaten Bojonegoro

<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Bentuk dan Kondisi</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Perlengkapan Kantor BPBD Bojonegoro</b>	Alat perkantoran dalam kondisi cukup baik dan jumlah sebanding dengan kebutuhan	Beberapa alat diperbantukan di Kecamatan
<b>Kendaraan Dinas BPBD Bojonegoro</b>	Mobil dalam penggunaannya sudah mampu mencukupi dalam kegiatan terutama penanggulangan bencana	Mobilisasi penanggulangan bencana terlaksana di setiap Destana
<b>Peralatan Penanggulangan Bencana</b>	Berbagai peralatan kebencanaan dalam Desa Tangguh Bencana dan cukup lengkap	Kelengkapan setiap Destana
<b>Pengelolaan</b>	diperlukan pengadaan, pemakaian, serta pemeliharaan yang baik sehingga semua sarana dan prasarana dapat sesuai dengan kebutuhan program dan keberadaannya selalu siap terpakai	

Sumber: diolah oleh Peneliti,2022

Terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana terdapat dalam tabel 3. peneliti menemukan masih ada beberapa desa yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Sehingga meminjam sarana dan prasarana milik desa lain saat terjadinya bencana. Akibatnya penanggulangannya menjadi terhambat.

### 3.4. Kualitas dan Kuantitas

Penulis melakukan analisis terhadap kualitas Desatana di Bojonegoro bahwasanya diketahui dalam pembentukan Destana di Bojonegoro rata-rata masih Pratama (tingkat pertama) hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang hanya mampu membentuk Desa sedemikian rupa, selain itu juga dalam pengembangan Destana juga masih belum merata ke semua wilayah sesuai observasi peneliti di lapangan dengan tidak meratanya sarana dan prasarana yang ada di masing-masing Desa Tangguh Bencana. Terbatasnya anggaran merupakan salah satu penyebab terhambatnya pengembangan Desa



Tangguh Bencana. Hal ini menandakan masih ada diperlukan penanganan lebih lanjut untuk pengembangan dan pemeliharaan Desa Tangguh Bencana.

Dari segi kuantitas Destana di Kabupaten Bojonegoro diketahui bahwa sejak awal program pembentukan Desa Tangguh Bencana yakni pada tahun 2013 di Desa Pilangsari hingga kini sudah membentuk kurang lebih 25 Desa Tangguh Bencana. Mengacu pada data diatas pada dasarnya sudah banyak Desa Tangguh Bencana yang terbentuk baik itu oleh BNPB, BPBD, maupun dari desa itu sendiri. Namun jika melihat pada luasnya wilayah Kabupaten Bojonegoro secara keseluruhan tentu belum bisa menjangkau seluruh wilayah rawan bencana secara merata karena terbatasnya sumber daya dan anggaran yang ada.

### **3.5. Waktu**

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu ketepatan waktu ini dapat dijadikan suatu indikator berjalan efektif atau tidaknya suatu kegiatan. Pada program Desa Tangguh Bencana sendiri khususnya pembentukan Desa Tangguh Bencana diperlukan optimalisasi waktu karena akan sangat berpengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan dampak yang terjadi.

Diketahui juga bahwa pembentukan Desa Tangguh Bencana ini dianggarkan setiap tahunnya, mengingat masih banyak desa rawan bencana yang ada di Kabupaten Bojonegoro maka hal ini harus terus diupayakan. Kita berusaha agar Desa Tangguh Bencana ini dapat cepat terbentuk di desa-desa lainnya karena untuk meminimalisir jika sewaktu-waktu bencana datang. Namun dalam pengerjaannya kita juga menyesuaikan dengan kondisi di lapangan selain itu juga memperhatikan ketersediaan personil di Kantor, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu bencana kapan datang sehingga pasti banyak juga personil yang turun di lapangan.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan program Destana di Kabupaten Bojonegoro yang dinaungi BPBD Kabupaten Bojonegoro membawa dampak positif dimana dapat meminimalisir kerugian baik materiil maupun mental dari masyarakat yang mengalami peristiwa bencana alam. Namun tidak menutup fakta bahwa dalam pelaksanaan Destana ini masih ada beberapa hambatan yang sama halnya dalam penelitian oleh Munir(2016) yang menemukan faktor penghambat pelaksanaan Desa Tangguh Bencana yaitu masih kurangnya minat dan kesadaran generasi muda, kurangnya fasilitas yang dimiliki relawan destana, serta belum adanya anggaran guna pengadaan operasional. Hal itulah yang menjadikan pelaksanaan Destana belum bisa maksimal.

Adanya hambatan yang sudah terjadi sebagaimana dalam penelitian Munir(2016) juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fikri(2016). Dalam penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Destana yaitu berupa kurangnya dukungan dari pemerintah yang terkait produk hukum, anggaran, dan sumberdaya yang berkompeten yang menjadikan pelaksanaan Destana di lapangan belum maksimal. Hal tersebut sama halnya dengan penelitian ini dimana aspek anggaran menjadi hambatan yang cukup signifikan.

Selain adanya hambatan yang ada pada pelaksanaan program Destana di Kabupaten Bojonegoro ini juga terdapat penunjang keberhasilan sebagaimana ditemukan pada penelitian Prastika(2019). Pada penelitian tersebut mengemukakan bahwa dengan tidak adanya perbedaan kinerja pada aspek legislasi yangmana mencapai 100% menunjang keberhasilan penanggulangan bencana alam dari Destana yang masimal selain itu dalam pencapaian pada aspek perencanaan, pendanaan, kelembagaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Destana juga ditentukan kinerja pelaksanaan di lapangan.

### 3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan permasalahan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan Destana ini adalah dengan adanya Desa yang jauh dari pusat perkotaan. Sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dijangkau karena jaraknya yang jauh dari pusat kota. Hal tersebut membawa dampak buruk apabila jarak desa rawan bencana yang relatif jauh dari pusat kota maka juga membuat waktu yang dibutuhkan semakin lama dalam menjangkanya saat penanggulangan bencana dilakukan. Selain itu sulitnya akses menuju ke lokasi juga semakin menambah biaya dan tenaga yang lebih. Untuk itu diperlukannya perencanaan yang maksimal untuk dapat mengatasi kondisi diluar dugaan bencana yang terjadi dengan jarak tempuh atau aksesibilitas yang sulit.

## IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Destana sudah cukup baik namun memang masih mengalami permasalahan. Permasalahan yang ada terjadi antara lain dari belum siapnya sumber daya manusia untuk mendukung program Desa Tangguh Bencana, masih ada masyarakat yang memiliki kesibukan lainnya sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan yang bersangkutan berhalangan hadir. Kemudian permasalahan yang ada juga dari terbatasnya anggaran membuat kegiatan pembentukan dan pengembangan mengalami kendala. Hal ini akan mengakibatkan proses pengelolaan anggaran menjadi rancu dan mayoritas Desa Tangguh Bencana harus menyediakan dana sendiri. Dengan adanya keterbatasan pada anggaran juga berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di desa. Banyak desa yang belum memiliki sarana dan prasarana sendiri untuk penanggulangan bencana. Selain itu masih banyaknya Desa Tangguh Bencana yang masih dalam kategori Pratama dan masih banyak Destana yang belum terbentuk di desa-desa terutama yang berada jauh dari pusat kota. Selanjutnya permasalahan dari segi waktu yang ditempuh untuk mencapai daerah yang akan diadakan pembentukan Desa Tangguh Bencana relatif lama dikarenakan sulitnya akses dan jauhnya jarak desa. Ini akan berpengaruh pada desa lainnya juga karena mengalami keterlambatan dalam penanggulangan bencana. Guna mengoptimalkan pelaksanaan Destana yang masih mengalami permasalahan tersebut, disarankan untuk meningkatkan program dengan sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat agar nantinya seluruh masyarakat mempunyai bekal dan kemampuan yang dapat disalurkan kepada yang lain serta perlu menambah fasilitator Desa Tangguh Bencana yang berasal dari desa karena terbatasnya fasilitator dari BPBD untuk membentuk kepercayaan dengan masyarakat tanpa mengabaikan fasilitator yang ada sebelumnya, karena seperti diketahui bahwa adanya keterkaitan masyarakat dari dalam, kepercayaan dan pemahaman dengan masyarakat akan lebih cepat didapatkan. Selain itu juga perlunya dibuatkan regulasi kepada setiap desa agar mempunyai anggaran tersendiri untuk penanggulangan bencana mengingat mayoritas di Kabupaten Bojonegoro adalah daerah rawan bencana untuk dapat siap siaga menanggulangi bencana yang sifatnya *unpredictable*. Selanjutnya untuk dapat difokuskan lagi untuk pengembangan Desa tangguh Bencana yang sudah ada serta diupayakan lagi untuk membentuk lebih banyak Desa Tangguh Bencana yang lain agar semua desa di Kabupaten Bojonegoro menjadi Desa Tangguh Bencana yang dapat dijadikan contoh daerah lainnya. Kemudian untuk waktu dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana sudah baik, hanya saja mungkin perlu ditingkatkan untuk pengawasan Desa Tangguh Bencana yang jaraknya jauh karena pasti membutuhkan waktu untuk pengawasan. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi dan monitoring secara online untuk meminimalisir risiko yang ada.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu pelaksanaan penelitian yang ditentukan hanya selama 14 (empat belas) hari kerja. Penelitian juga hanya dilakukan pada BPBD Kabupaten Bojonegoro berkenaan dengan fokus penelitian yang telah peneliti tentukan sebelumnya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa



berkaitan dengan pelaksanaan program Destana untuk mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro untuk dapat menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti tujukan kepada seluruh pegawai BPBD Kabupaten Bojonegoro, Kepala Desa di Bojonegoro beserta jajarannya serta masyarakat Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Munir, M.dkk. 2017. *Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2016*. Doctoral dissertation. Diponegoro University.
- Nugroho, Sigit S. 2020. *Hukum Mitigasi Bencana di Indonesia*. Klaten: Lakeisha
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rachmat, Agus. 2006. *Manajemen dan Mitigasi Bencana*. Makalah. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLDH) Provinsi Jawa Barat.
- Satu Data Bojonegoro. 2021. *Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bojonegoro*. Diperoleh dari <https://data.bojonegorokab.go.id/> diakses pada tanggal 2 september 2021
- Siagian, Sondang P. 2008. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Zainal, M.dkk. 2020. *Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pidie Jaya Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal. Fakultas Teknik. Universitas Syiah Kuala: Banda Aceh
- Zulkarnain, D. A. A. 2019. *Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (Destana) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Banjir*. Doctoral dissertation. Universitas Airlangga.